

## ABSTRAK

Nama : Afrilya Aura Putri

NPM : 01659210100

Title : **Kepastian Hukum Penggunaan Purchase Order (PO) dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Angkasa Pura Kargo**

( xi + 122 halaman)

PT Angkasa Pura Kargo sebagai anak Perusahaan PT Angkasa Pura II dan sebagai cucu Badan Usaha Milik Negara PT Aviawi Pariwisata Indonesia (Persero) dalam penerapan kontrak Pengadaan Barang/Jasa menjadikan *Purchase Order* (PO) sebagai dokumen untuk mengikat diri antara Penyedia Barang/Jasa dengan PT Angkasa Pura Kargo dimana hal ini tercantum dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di PT Angkasa Pura Kargo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan mengacu pada norma hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur dan menggunakan sumber data sekunder serta wawancara sebagai penunjang yang kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah Pembentukan *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengadaan Barang/Jasa di PT Angkasa Pura Kargo memberikan kelaziman hukum pada penggunaan *Purchase Order* (PO) sebagai kontrak yang sah di PT Angkasa Pura Kargo sebagai afiliasi BUMN dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan terpenuhinya ketentuan-ketentuan pada Hukum Kontrak yang menjadikan Kedudukan Hukum *Purchase Order* (PO) menjadi jelas.

Referensi : 24 (1982 - 2020)

Kata Kunci : Pengadaan Barang/Jasa, Kontrak

## **ABSTRACT**

*Name : Afrilya Aura Putri*  
*NPM : 01659210100*  
*Title : Kepastian Hukum Penggunaan Purchase Order (PO) dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Angkasa Pura Kargo*

*( xi + 122 halaman)*

*PT Angkasa Pura Kargo as a subsidiary of PT Angkasa Pura II which is a subsidiary of the State-Owned Enterprise PT Aviawi Wisata Indonesia (Persero) in the agreement implementing the Procurement makes a Purchase Order (PO) to bind itself between the Supplier and PT Angkasa Pura Kargo where this is stated in the Procurement Guidelines at PT Angkasa Pura Kargo. This research uses a normative research method referring to legal norms which is carried out by reviewing materials originating from various statutory regulations and other materials from various literature and using secondary data sources and interviews as support, which is then analyzed descriptively analytically. The result of this research is that the establishment of a Standard Operating Procedure (SOP) for Procurement at PT Angkasa Pura Kargo provides legal norms for the use of purchase orders (PO) as a valid contract at PT Angkasa Pura Kargo as a BUMN affiliate while still referring to the Regulation of the Minister of State for BUMN Number PER-08/MBU/12/2019 concerning General Guidelines for Implementing the Procurement for State-Owned Enterprises and fulfilling the provisions of the Contract Law which makes the Legal Position of Purchase Orders (PO) clear.*

*Reference : 24 (1982 - 2020)*

*Keyword : Procurement, contract*